

Judul : Pemerintah jangan terjebak pola gali-tutup lubang
Tanggal : Rabu, 12 Juli 2017
Surat Kabar : Republika
Halaman : 2

Pemerintah Jangan Terjebak Pola Gali-Tutup Lubang



WAKIL KETUA DPR RI TAUFIK KURNIAWAN dan Agus Hermanto menerima laporan pembahasan RAPBN 2018 dari Ketua Banggar DPR RI.

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengingatkan Pemerintah untuk tidak terjebak pada pola gali lubang tutup lubang guna memenuhi anggaran untuk menggenjot infrastruktur. Hal itu disampaikan saat DPR dan pemerintah membahas pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2018 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018.

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan, defisit anggaran yang mendekati 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) harus mendapat perhatian Pemerintah. "Ini sudah lampu kuning. Artinya, beban utang kita harus menjadi semacam catatan khusus. Kerja keras harus dilakukan tidak hanya DPR saja, tapi juga pemerintah, supaya jangan sampai terjadi pola gali lubang tutup lubang," kata Taufik usai memimpin Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/7).

Agar pola itu tidak terjadi, Taufik meminta pemerintah mengoptimalkan fungsi program melalui pembangunan infrastruktur. Akan tetapi, dengan tidak menggunakan sumber anggaran dari utang. Pemerintah seharusnya menggunakan anggaran yang dimampukan oleh kemampuan APBN.

Apalagi, kondisi perekonomian global yang belum membaik berpotensi memengaruhi ekonomi Tanah Air. Mulai kondisi perekonomian Amerika Serikat, isu akan dinaikannya suku bunga The Fed oleh Bank Federal, hingga masalah krisis Timur Tengah yang berpengaruh pada harga minyak dunia.

"Kalau itu menjadi semacam kenyataan, tentu akan berpengaruh pada ekonomi kita. Perlu pencermatan dengan tren turunnya harga minyak dunia, yang berpengaruh pada penerimaan negara yang semakin kecil," kata

politikus Fraksi PAN itu.

Sebagai solusi, Taufik berharap pemerintah menggenjot program padat karya yang menyentuh sektor riil. Dengan begitu, bisa meningkatkan peluang lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Kesenjangan ekonomi masyarakat pun diharapkan bisa ditekan.

"Khusus masalah kesenjangan ekonomi ini, saya mengusulkan pada optimalisasi dana desa. Dana desa sebetulnya memiliki kedahsyatan untuk bisa mengangkat dan mengurangi kesenjangan di masyarakat, asal prinsip penggunaannya anggaran dana desa itu betul-betul juga digunakan untuk program padat karya," tegas Taufik.

Agar program ini dapat berjalan dengan efektif, ia mengharapkan optimalisasi peran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Alasannya, dengan anggaran yang mencapai lebih dari Rp 70 triliun di APBN, perlu adanya panduan dari Pemerintah guna memaksimalkan dana itu.

"Dana desa mempunyai *multiplier effect*. Jangan sampai membangun desa, tapi sumber dayanya dari desa lain, bahkan di luar kota. Jika sumber dayanya dari daerah lain, tidak akan berimbas pada masyarakat setempat. Pemerintah tidak perlu merisaukan kesenjangan ekonomi, jika dana desa terserap efektif," kata Taufik optimis.

Politikus asal dapil Jawa Tengah itu pun meminta pemerintah memaksimalkan sektor penerimaan pajak guna menyokong anggaran tahun mendatang. Keberhasilan program pengampunan pajak pada tahun ini bisa menjadi langkah Direktorat Jenderal Pajak, guna meningkatkan penerimaan pajak.

"Database wajib pajak yang didapatkan pada pelaksanaan pengampunan pajak, dapat dimanfaatkan Dirjen Pajak untuk me-

ningkatkan penerimaan pajak di luar PNBP. Tapi jangan kemudian untuk meningkatkan target penerimaan pajak, yang dikejar masyarakat menengah ke bawah yang memiliki Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP)," pesan Taufik.

Prioritas RKP 2018

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Azis Syamsuddin dalam laporannya menyampaikan, dewan telah membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN bersama Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia. Banggar DPR bersama Pemerintah juga membentuk sejumlah panitia kerja (panja) guna membahas RAPBN 2018.

Azis menjelaskan, prioritas RKP tahun 2018, yakni pendidikan; kesehatan; perumahan dan pemukiman; pengembangan dunia usaha dan pariwisata; ketahanan energi; ketahanan pangan; penanggulangan kemiskinan; infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman; pembangunan wilayah; politik, hukum, pertahanan dan keamanan; dan prioritas khusus Asian Games dan Asian Paragames.

"Pertumbuhan ekonomi pada kisaran asumsi dasar dalam RAPBN 2017, disepakati 5,2-5,6 persen, dari semula 5,4-6,1 persen dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Kemudian laju inflasi disepakati 2,5-4,5 persen dan nilai tukar rupiah Rp 13.300-13.500 per dolar AS," jelas Azis.

Kemudian, tambah politikus Partai Golkar itu, tingkat bunga SPN 3 bulan disepakati sebesar 4,8-5,6 persen, *lifting* minyak mentah Indonesia 45-55 dolar AS/barel, dengan *lifting* minyak bumi sebesar 771-815 ribu barel per hari, dan *lifting* gas bumi 1.194-1.235 ribu barel setara minyak per hari.

DPR dan Pemerintah juga menyepakati target pembangunan tahun 2018. Antara lain pengangguran sebesar 5,0-5,3 persen, angka kemiskinan 9,5-10,0 persen, gini rasio (indeks) 0,38, dan Indeks Pembangunan Manusia (dengan perhitungan yang baru) sebesar 71,50.

Pencapaian tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan tingkat kemiskinan pada 2018, jelas politikus asal dapil Lampung itu, sangat dipengaruhi oleh pencapaian pertumbuhan ekonomi untuk menghasilkan perluasan kesempatan kerja. "Dibutuhkan kesempatan kerja baru yang berkualitas serta dapat menurunkan TPT pada kisaran 5,0-5,3 persen. Penurunan jumlah pengangguran diharapkan membawa implikasi terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin, sehingga tingkat kemiskinan di kisaran 9,5-10,0 persen," ungkap Azis. ● ril.